

PEMBREDELAN SINAR HARAPAN TAHUN 1986

Yuli Andanwati

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

E-mail: yuli_aw15@yahoo.com

Wisnu

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Pembredelan yang dialami Sinar Harapan pada tahun 1986 adalah pembredelan yang terakhir secara permanen. Pembredelan tersebut terjadi dikarenakan pemberitaan – pemberitaan yang dimuat oleh Sinar Harapan, pemberitaan tersebut memuat kebijakan ekonomi negara yang diresmikan pada tanggal 12 September 1986. Pemberitaan kebijakan ekonomi yang dimuat secara berkala selama dua bulan membuat pemerintah ingin bertindak tegas terhadap Sinar Harapan. Pemerintah tidak menginginkan masyarakat resah dan terjadi kekisruhan dengan pemberitaan yang dimuat Sinar Harapan. Selama kurang lebih satu tahun Sinar Harapan tidak boleh terbit akibat isu – isu yang dimuat secara berkala. Sinar Harapan setelah mengalami pembredelan selama kurang lebih satu tahun berjuang kembali untuk mendapatkan SIUPP. Perjuangan tersebut harus memenuhi beberapa syarat, yaitu berganti nama dan menjadi surat kabar pendukung pemerintah.

Kata kunci: Pers, Pembredelan.

Abstract

Banning that reported Sinar Harapan in 1986 was the last ban permanently. Occurs due to the bans news - news that was published by Sinar Harapan, the reports contain the country's economic policy which was inaugurated on 12 September 1986. Preaching economic policy periodically loaded for two months to make the government wants to act decisively against Sinar Harapan. The government does not want people uneasy and chaos happening with the news that was published Sinar Harapan. For approximately one year Sinar Harapan not be published due to the issues - issues that regularly loaded. Sinar Harapan after a ban for more than a year to fight back to get press license. The struggle must meet several requirements, which changed its name and became a supporter of the government newspaper.

Key words: .Press, Bans

PENDAHULUAN

Pers berasal dari kata “*press*” dari bahasa Inggris yang berarti “persuratkabaran”. Undang – undang ketentuan – ketentuan pokok pers tahun 1982 yakni untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat berlandaskan demokrasi Pancasila, memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas kebebasan pers yang bertanggung jawab, mengabdikan kepada bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. Pers juga mempunyai hak kontrol, kritik, dan koreksi yang bersifat konstruktif. Pers berfungsi sebagai penyebar informasi yang obyektif,

menyalurkan aspirasi rakyat, meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat, dalam hal ini perlu dikembangkan interaksi positif antara pemerintah, pers dan masyarakat.¹

Kata “bredel” berasal dari bahasa Belanda “*breidel*” berarti “pengekangan”.² Dalam penulisan ini digunakan kata “bredel” seperti yang digunakan dalam

¹ Oemar Seno Adji. *Mass Media Dan Hukum*. Jakarta: Erlangga. 1977.

² Tim The Regagere, *Belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda*, (Media Books ISBN, 2009).

beberapa buku seperti: ”*Tuntutan Zaman Kebebasan Pers dan Ekspresi*”, Jakarta: Spasi & Vhr Book, 2009, Dan ”*Pers di Masa Orde Baru*”, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Dalam dunia media masa, pengekangan selalu berhubungan dengan kebebasan pers, kebebasan tersebut dapat memberikan dampak pada pers, yaitu beredel. Pembredelan pada masa Orde Baru adalah hal yang biasa. Biasanya disebut juga ”Pembatalan SIUPP” atau ”pencabutan SIUPP” yang dialami oleh beberapa surat kabar yakni surat kabar antara lain, *Kompas*, *Sinar Harapan*, *Pelita*, *The Indonesia Times*, *Sinar Pagi*, *Pos Sore*. Hal tersebut membuktikan kebebasan pers pada masa Orde Baru sangatlah lemah, dan dikendalikan penuh oleh pemerintah. Beberapa surat kabar yang diberedel diatas yang menjadi bahasan untuk diteliti adalah harian *Sinar Harapan*.

Koran *Sinar Harapan* tersebut memiliki riwayat pembredelan tidak hanya sekali Pembredelan terjadi pada tahun 1965, 1970, 1971, 1972, 1974, 1977 dan 1978. Pada tahun tersebut pembredelan *Sinar Harapan* hanya mendapat larangan terbit selama dua minggu. Pembredelan itu tidak menyurutkan semangatnya untuk berhenti memuat berita tentang kondisi pemerintah. Frekuensi isu-isu sensitif bagi pemerintah hanya akan memberikan dampak yang buruk bagi *Sinar Harapan*. Komenta-komenta speku latif dalam rubrik *Sinar Harapan* terus menerus beredar, dari bulan September sampai awal Oktober 1986 itulah yang menjadi perbedaan antara koran lain. *Sinar Harapan* memiliki keberanian dibanding koran lain, karena isu yang menyinggung kebijakan pemerintah. *Sinar Harapan* terlalu agresif dalam memberikan berita yang berhubungan dengan pemerintah. Koran lain lebih memilih mengikuti perintah pemerintah, sedangkan *Sinar Harapan* lebih memilih memuat berita tentang pemerintah yang bersifat negatif maupun positif. Pelanggan – pelanggan setia *Sinar Harapan* adalah pembaca yang sangat berminat dengan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan publik. Pembredelan terakhir terjadi pada tahun 1986 secara permanen. Riwayat tersebut diberedel.³

Harian ini dinilai pandai mencari informasi. Cerdik menyiasati penulisan berita yang kasar namun aman. Pemimpin redaksi *Sinar Harapan* dipandang mahir dan terlatih. Harian *Sinar Harapan* yang berlokasi di Jl. Raden Saleh No. 1 B-D Jakarta. Pada tanggal 9 oktober 1986, *Sinar Harapan* mendapat larangan terbit secara permanen yang pertama kali oleh pemerintah dibawah peraturan SIUPP yang baru. Surat kabar ini dilarang terbit lantaran menurunkan analisa seputar kebijakan ekonomi.⁴

Pencabutan SIUPP *Sinar Harapan* tersebut dilakukan sesuai dengan Undang – Undang. Pembatalan SIUPP *Sinar Harapan* yang terbit di Jakarta itu

dinyatakan dalam Surat Keputusan menteri penerangan No. 8/Ditjen PPG/K/1986, yang ditandatangani dirjen pembinaan pers dan grafika, Sukarno *SINAR HARAPAN*, atas nama menteri penerangan.⁵

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian yang mengkaji tentang ”Pembredelan Sinar Harapan Tahun 1986 ” penulis menggunakan metode penelitian sejarah. Ada empat tahapan di dalam metode penelitian sejarah yaitu: Langkah awal yang dilakukan yaitu heuristik. Pada tahap ini penulis mencari dan mengumpulkan sumber. Penulis melakukan pencarian sumber melalui pemberitaan surat kabar seaman seperti *Sinar Harapan*, *Kompas*, *Medan*. Sumber sekunder antara lain : buku yang berkaitan dengan pembredelan yaitu buku *Pers Pada Masa ORBA* karya David. T. Hill, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers DI Indonesia* karya Atmakusuma, *Sejarah Pembredelan Pers di Indonesia* karya Edward Cecil Smith. Selain itu penulis juga melakukan penelusuran sumber, study pustaka di Perpustakaan UNESA, Perpustakaan Daerah Surabaya, Perpustakaan Medayu Agung dan Perpustakaan Nasional Indonesia untuk mengkaji lebih dalam tentang penelitian ini.

Langkah kedua yaitu kritik intern. Dalam tahap kritik sumber ini penulis hanya melakukan kritik intern, sumber diseleksi dan dinilai kredibilitasnya, sehingga diperoleh data sebagai suatu fakta sejarah. Dalam mengidentifikasi sumber yang berupa surat kabar diadakan uji otentitas, kapan sumber itu ditulis, untuk memahami jarak waktu peristiwa sejarah terjadi dengan kapan ditulisnya sumber atau data asli. Misalnya saja surat kabar *Sinar Harapan* bulan September 1986 yang memaparkan tentang kebijakan ekonomi negara. Data ini merupakan fakta karena sesuai dengan buku. Data tersebut juga dicocokkan dengan surat kabar *Kompas*, dengan tahun terbit yang sama, sebagai pembandingan.

Langkah ketiga yaitu interpretasi atau penafsiran. Pada tahap ini penulis mencari keterkaitan antar berbagai fakta yang telah diperoleh kemudian menganalisis hasil dari penafsirannya, dengan cara menyusun fakta-fakta yang telah diperoleh secara kronologis dari sumber sejarah wawancara dan sumber primer koran seaman serta buku-buku hasil penelitian terdahulu. Kegiatan ini berakhir dengan terjawabnya semua rumusan masalah, yang kemudian dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Setelah terjadi rekonstruksi sejarah dalam proses interpretasi, maka pada tahap terakhir dilakukan historiografi yaitu penulisan laporan penelitian berupa

³David. T. Hill, *Pers di Masa Orde Baru*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2011), hlm. 102.

⁴Ibid.

⁵Kompas 9 Oktober 1986.

artikel sebagai hasil penelitian sejarah tentang “Pembredelan *Sinar Harapan* Tahun 1986”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Dibalik Kebijakan Devaluasi

Dalam pidato kenegaraan tanggal 15 Agustus 1986, Presiden Soeharto menyampaikan bahwa “Ekonomi kita sedang menghadapi ujian dan tantangan berat”.⁶ Tantangan berat itu bersumber kepada merosotnya harga minyak yang sangat tajam. Disamping itu harga – harga komoditi pertanian dan pertambangan di pasaran dunia sangat rendah terutama turunnya harga minyak bumi dipasaran.⁷

Dua masalah mendesak yang menurut pemerintah harus segera diatasi adalah; (1) bagaimana mengatasi akibat yang sangat parah dari merosotnya harga minyak; (2) bagaimana membawa perekonomian agar selamat melewati rapuhnya pasar minyak bumi. Tanpa langkah – langkah untuk mengatasi sejak dini, maka kemerosotan harga minyak bumi tadi akan mempunyai pengaruh yang luas pada tingkat pendapatan masyarakat, lapangan kerja dan kegiatan ekonomi pada umumnya.⁸

Akibat langsung dari kemerosotan harga minyak belum terasa meluas, karena tiga hal utama, yaitu; (1) ketahanan ekonomi Indonesia yang telah sangat meningkat selama 20 tahun terakhir; (2) usaha pemerintah secara terus menerus untuk melindungi masyarakat terhadap akibat gejolak tajam pasaran minyak bumi di pasaran dunia; dan (3) keseluruhan langkah – langkah yang telah diambil oleh pemerintah sejak beberapa tahun lalu, antara lain peningkatan penerimaan negara di luar minyak dan gas bumi. Pengerahan tabungan masyarakat, pemupukan cadangan devisa, penjadwalan kembali proyek – proyek besar dan berbagai langkah lainnya. Berdasarkan perkembangan – perkembangan tersebut, pemerintah menyimpulkan bahwa langkah pokok yang harus diambil adalah menjaga agar neraca pembayaran dalam keadaan yang cukup sehat untuk memelihara jalannya pembangunan.⁹

Untuk itu pemerintah mengambil keputusan mengadakan devaluasi nilai mata uang rupiah. Besarnya tingkat devaluasi itu adalah 45 persen dari nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang berlaku.

⁶*Sinar Harapan*, 13 September 1986.

⁷Pada waktu persiapan APBN 1986/87

diperkirakan bahwa harga minyak akan turun dari \$ 28 menjadi \$ 25 setiap barrel, dan walaupun lebih menurun lagi maka akan bergerak sekitar \$ 20 setiap barrel. Pada bulan Januari 1986 harga minyak bumi masih berada diatas \$ 25 setiap barrel. Akan tetapi dalam enam bulan terakhir ini harga minyak bumi di pasaran dunia telah merosot dengan sangat tajam, sampai pernah \$ 10 setiap barrelnya. Akhir – akhir ini harga minyak bumi kita berkisar sekitar \$ 12 barrel.

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*

Adapun nilai tukar setelah langkah devaluasi tersebut akan berlaku mulai tanggal 12 September 1986. Jika kurs tengah hari sebesar Rp. 1.134 untuk satu dollar AS, maka pada saat berlakunya devaluasi ini kurs tengah itu menjadi Rp. 1.644 untuk satu dollar AS. Dengan devaluasi ini neraca pembayaran akan dapat dipertahankan pada tingkat yang sehat, karena cadangan devisa akan dapat dipertahankan pada jumlah yang cukup untuk mengamankan jalannya pembangunan dan kelancaran perekonomian masyarakat. Di satu pihak, barang – barang ekspor nonmigas akan lebih mempunyai daya saing di pasaran Internasional, sedangkan di lain pihak impor barang – barang jadi akan berkurang karena harganya akan lebih mahal. Dengan demikian diharapkan kegiatan industri dalam negeri akan makin bergairah, karena kapasitas produksi yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal, baik untuk memenuhi pasaran di dalam negeri maupun untuk ekspor.¹⁰

1. Perbaikan Tata Niaga Bidang Impor

Sumber *Sinar Harapan* mengatakan dikeluarkannya keputusan devaluasi rupiah dimaksudkan untuk penyelenggaraan dan pemantapan kebijaksanaan impor, karena pemerintah merasa perlu mengambil langkah – langkah guna memperkuat daya saing barang hasil industri dalam negeri. Selain itu dimaksudkan untuk menciptakan iklim usaha dalam mana pelaksana niaga dapat melakukan kegiatan usaha secara sehat dan wajar.

2. Bantahan Pemerintah Terhadap Pencabutan Surat Keputusan Tata Niaga Bidang Impor.

Menteri perdagangan, Rachmat Saleh, SE menyesalkan dengan pemberitaan yang dimuat oleh *Sinar Harapan*. Pemberitaan tersebut seolah – olah pemerintah akan mencabut ketentuan – ketentuan tata niaga di bidang impor. *Sinar Harapan* pada tanggal 8 Oktober 1986 telah memuat berita di halaman utamanya dengan judul “Pemerintah akan cabut 44 SK Tata Niaga Bidang Impor” berita tersebut menurut Rachmat Saleh tidak benar dan dapat mengakibatkan keragu – ragan bahkan kegelisahan di kalangan masyarakat khususnya masyarakat dunia usaha. Dalam keadaan yang sulit dan penuh tantangan, pemerintah tentu akan terus berusaha menyempurnakan peraturan – peraturan dalam rangkai meningkatkan efisiensi dan produktivitas nasional.¹¹

Pemerintah mengadakan penelaahan tentang hal – hal yang dapat dan yang perlu dilakukan guna mendorong perkembangan ekonomi terutama untuk meningkatkan ekspor nasional. Pemerintah mungkin juga akan berkesimpulan akan mengadakan beberapa deregulasi di bidang ketentuan – ketentuan impor. Namun hubungan dengan berita tersebut disuruhkan kepada dunia usaha agar tetap bekerja berdasarkan ketentuan –

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Medan*, 10 Oktober 1986

ketentuan yang ada dan tidak terpengaruh oleh adanya pemberitaan yang disiarkan oleh *Sinar Harapan*.

B. Tindakan Pemerintah Terhadap *Sinar harapan*

Surat kabar harian *Sinar Harapan* sesuai dengan penyajiannya sering menampilkan berita – berita kontroversi mengenai kritikan terhadap kebijakan pemerintah dibidang ekonomi terutama pada bagian depan (*head line*) dan tajuk rencana yang dinilai berbagai kalangan cukup keras. Berbagai variasi “keras” itu kebanyakan karena memang isi berita “*hed line*” dan isi tajuk memang keras.

Sinar Harapan mengeluarkan berita utama *head line* di halaman depan yang berjudul “ Pemerintah akan cabut 44 SK Tata Niaga Bidang Impor”, Sebagai berikut:

“...Sumber “SH” mengatakan dikeluarkannya keputusan ini dimaksudkan untuk penyelenggaraan dan pemantapan kebijaksanaan impor, karena pemerintah merasa perlu mengambil langkah – langkah guna memperkuat daya saing barang hasil industri dalam negeri, Selain itu dimaksudkan untuk menciptakan iklim usaha dimana para pelaksana niaga dapat melaksanakan kegiatan usaha secara sehat...”¹²

Akibat pemberitaan diatas pada hari Kamis 9 Oktober 1986 *Sinar Harapan* tidak diizinkan terbit lagi, dan dibatalkan SIUPP-nya (surat izin usaha penerbitan pers). Pembatalan SIUPP *Sinar Harapan* yang terbit di Jakarta itu dinyatakan dalam surat keputusan Ditjen PPG/K/1986, yang ditandatangani Dirjen pembinaan pers dan grafika, Sukarno SH, atas nama Menteri Penerangan.

KESIMPULAN

Sinar Harapan yang terbit perdana pada tanggal 27 April 1961 adalah surat kabar yang cukup berani dan lucas memberitakan kondisi ekonomi pemerintah. Pemberitaan ekonomi negara menjadi muatan halaman depan dan tajuk rencana. Pemberitaan tersebut menjadi alasan pemerintah melakukan pembredelan secara permanen pada tanggal 9 Oktober 1986. Pembatalan SIUPP oleh menteri penerangan mempertegas *Sinar Harapan* tidak akan bisa terbit lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. TERBITAN RESMI PEMERINTAH

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1966

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1982

¹²*Sinar Harpan*, 8 Oktober 1986.

B. Sumber Surat Kabar

Sinar Harapan 12 September 1986
Sinar Harapan 13 September 1986
Sinar Harapan 14 September 1986
Sinar Harapan 15 September 1986
Sinar Harapan 16 September 1986
Sinar Harapan 17 September 1986
Sinar Harapan 18 September 1986
Sinar Harapan 19 September 1986
Sinar Harapan 20 September 1986
Sinar Harapan 21 September 1986
Sinar Harapan 22 September 1986
Sinar Harapan 23 September 1986
Sinar Harapan 24 September 1986
Sinar Harapan 25 September 1986
Sinar Harapan 26 September 1986
Sinar Harapan 27 September 1986
Sinar Harapan 28 September 1986
Sinar Harapan 29 September 1986
Sinar Harapan 30 September 1986
Sinar Harapan 1 Oktober 1986
Sinar Harapan 2 Oktober 1986
Sinar Harpan 3 Oktober 1986
Sinar Hrappan 4 Oktober 1986
Sinar Harapan 6 Oktober 1986
Sinar Harapan 7 Oktober 1986
Sinar Harapan 8 Oktober 1986
Kompas 9 Oktober 1986.
Kompas 11 Oktober 1986
Kompas 14 Oktober 1986
Kompas 17 Oktober 1986
Kompas 25 oktober 1986
Medan 9 Oktober 1986
Medan 10 Oktober 1986
Medan 11 oktober 1986
Suara Pembaharuan 29 januari 2008

Harian Umum Sore *Sinar Harapan*news 4 April 2012

C. SUMBER BUKU

Atmakusuma. “Tuntutan Zaman Kebebasan Pers dan *Ekspresi*”. Jakarta: Spasi & Vhr Book .2009.

_____. *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers Di Indonesia*. Jakarta: Kompas. 2004.

Abdurachman Surjomihardjjo. *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers Di Indonesia*. Jakarta: Buku Kompas.2002.

Basilius Triharyanto. *Pers Perlawanan, Politik Wacana Antikolonialisme pertja selatan*. Yogyakarta: Lkis.2009.

Broder David S. *Berita Dibalik Berita*. Jakarta: Pustaka *Sinar Harapan*.1992.

- Simorangkir, *SINAR HARAPAN. Pers SIUPP dan Wartawan*. Jakarta: PT Gunung Agung. 1986.
- Hill. David. T *Pers di Masa Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2011.
- _____. *Jurnalisme dan Polittik Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Edward Cecil Smith. *Sejarah Pembredelan Pers di Indonesia*. Jakarta: Pusat.Grafiti Pers. Februari 1983.
- Erick Thohir. *Pers Indonesia Di Mata Saya*. Republika. februari 2011.
- H.M.Bahari. *Segi-Segi Hukum Kewartawanan: Tanggung Jawab Yuridis Seorang Jurnalis*. PT.Garuda Buana Indonesia. 1997.
- Hanif Suranto. Hawe Setiawan. Giny Ginanjar. *Pers Indonesia Pasca Soeharto*. Jakarta: Elang Langit. 1999.
- Idi Subandi Ibrahim. *Kritik Budaya Komunikasi*. Yogyakarta: Jalsutra. Mei 2011.
- Ignatius Haryanto. *Pembredelan Pers di Indonesia*. Jakarta: LSPP. 1996
- J Anto. *Pers Bebas Tapi Dilibas Cermin Retak kebebasan Pers di Sumatra Dan Aceh*. Medan: KKippas. 2005.
- Mohammad Goenawan. *Pers Hukum Dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Bentang Budaya. 1994.
- Nurudin. *Buku Pers Dalam Lipatan kekuasaan Tragedi Pers Tiga Zaman*. UUM. 2008.
- Njoto. *Pers dan Masa*. N. V Rakyat. 1958.
- Oemar Seno Adji. *Mass Media Dan Hukum*. Jakarta: Erlangga. 1977.
- Omi Intan Naomi. *Anjing Penjaga: Pers Di Rumah Orde Baru*. Gorong – Gorong Budaya Bekerja Sama dengan Institut Studi Arus Informasi. Juni 1996.
- Rizzal Mallarangeng. *Pers Orde Baru Tinjauan Isi Kompas Dan Suara Karya*. Kepustakaan Populer Gramedia. 2010.
- Tribuana Said. *Sejarah Pers nasional dan Pembangunan Pers Pancasila*. Jakarta: Haji Masgung
- Warner j. Senerin. James. Tenkard, jr. *Teori Komunikasi Sejarah Metode dan Terapan di dalam Media Massa*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1990